



**Judul** : Polri tunggu hasil MKD  
**Tanggal** : Sabtu, 25 November 2017  
**Surat Kabar** : Republika  
**Halaman** : 2

# Polri Tunggu Hasil MKD

• ARIF SATRIO NUGROHO

**Gerindra pantau kasus Viktor agar tetap diusut.**

JAKARTA – Mabes Polri masih belum menentukan waktu pemeriksaan kepada politikus Partai Nasdem Viktor Laiskodat dalam kasus dugaan ujaran kebencian. "Yah nanti itu penyidik itu yang menentukan," ujar Kepala Divisi Penuntutan dan Pengembangan Polri Brigjen Rikwanto saat ditanya terkait pemeriksaan Viktor di Mabes Polri, Jumat (24/11).

Polri mengaku telah memeriksa sekitar 20 saksi dan masih melakukan koordinasi dengan DPR. Koordinasi itu berkaitan Undang-Undang MD3 dan Majelis Kehormatan Dewan (MKD).

"Kita mintakan salah satu kegiatan selanjutnya adalah adanya sidang yang di Majelis Kehormatan Dewan yang bisa menyatakan apakah pernyataan saudara Viktor kaitan pribadi atau dalam kaitan sebagai anggota DPR, semua berjalan beriringan bersamaan," kata Rikwanto.

Polri masih menunggu hasil dari sidang yang akan digelar oleh MKD. Menurut Rikwanto, hal tersebut menjadi tahapan yang memang harus

dilakukan. "Kenapa itu kita lakukan dan kita tunggu karena memang ada hal yang dalam proses penyelidikan dan penyidikan itu harus dilakukan," katanya menambahkan.

Selain itu, penyidik akan melakukan pemeriksaan pada saksi ahli. Rikwanto mengklaim, penyidik sudah menjalankan fungsi penyelidikan sebagaimana mestinya. Penyidik telah memeriksa hampir 20 saksi di tempat kejadian perkara. Kendati demikian, menurut Rikwanto, masih ada lagi yang perlu diambil keteranganya dalam kaitan yang dikatakan Viktor Laiskodat.

"Kita juga perlu memeriksa lagi para saksi ahli untuk menjelaskan secara bahasa," kata Rikwanto.

Penyidik, kata Rikwanto, akan memeriksa ahli bahasa untuk mengetahui maksud dan tujuan ucapan Viktor. "Bahasa yang digunakan pada waktu itu apakah cukup mengandung unsur-unsur sesuai yang dilaporkan," ujarnya.

Viktor dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian dan permusuhan terkait pidatonya di Nusa Tenggara Timur pada 1 Agustus lalu. Pidato Viktor di NTB tersebut pun viral di dunia maya. Dalam video tersebut, Viktor diduga menuduh empat partai, yaitu Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN men-

„

**Kita juga perlu memeriksa lagi para saksi ahli untuk menjelaskan secara bahasa.**

dukung adanya khilafah karena menolak Perppu Ormas.

Sementara, Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule mengatakan, pihaknya telah mengunjungi Bareskrim Polri untuk minta kejelasan akan laporannya terkait ujaran kebencian yang dilakukan oleh Viktor Laiskodat. Iwan mengaku mendesak penyidik untuk segera mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

"Tapi kata penyidiknya pekan depan baru dikasih," ujar Iwan kepada Republika, Kamis (23/11).

Oleh karena itu, pihaknya masih menunggu SP2HP tersebut. Namun, Iwan memastikan jika Gerindra akan terus memantau kasus Viktor agar tidak mengulangi begitu saja.

"Iya itu pasti, kami akan terus mendesak mengawal (laporan)," ujar Iwan.

Menurut Iwan, pernyataan polisi yang menunggu hasil sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas hak imunitas Viktor sebagai anggota DPR sangat tidak masuk akal. Pasalnya, kasus yang dilaporkannya menegaskan dugaan pidana yang dilakukan Viktor saat berpidato di NTB.

"Ini dua hal yang berbeda," ujar Iwan.

Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan apakah di dalam pidato Victor ada unsur pidana. Sedangkan MKD mengadili perihal dugaan pelanggaran etik yang dilakukan anggota DPR tersebut. Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan serta menghentikan sebuah kasus pidana harus mengacu pada KUHAP, sedangkan MKD tidak.

"Jadi menutut saya, mereka sepetinya mau lempar tanggung jawab," kata Iwan.

Sementara, MKD DPR memastikan akan memproses sejumlah perkara yang dilaporkan ke MKD. MKD pun akan mengundang para pelapor terhadap anggota DPR Victor Bungilu Laiskodat. "Dalam rapim sudah di putuskan bahwa kita akan mengundang para pelapor di beberapa perkara yang saat ini sedang ditangani MKD, kita akan klarifikasi pelaporan itu," ujar Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad.

■ ed: muhammad hafiz